

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENGARUH TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : JUAN EZAR TAMBUNAN

NIM : 126231029

PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENGARUH TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : JUAN EZAR TAMBUNAN

NIM : 126231029

**LAPORAN TUGAS AKHIR DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTAN**

PROGRAM STUDI PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

**PENGARUH TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Juan Ezar Tambunan

126231029

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Sukrisno Agoes, Ak., M.M

**PENGARUH TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

Juan Ezar Tambunan

126231029

ABSTRAK

Dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, kinerja, kepatuhan, dan/atau investigatif terhadap pemerintah, BPK memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan, menyelesaikan permasalahan, dan/atau memperbaiki suatu sistem agar permasalahan serupa tidak terjadi lagi. Sampai dengan tahun 2023, masih terdapat rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang diukur berdasarkan rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap efisiensi keuangan pemerintah daerah dan pertumbuhan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: BPK, Tindak Lanjut Rekomendasi, Kinerja Pemerintah Daerah

ABSTRACT

In conducting audits of financial reports, performance, compliance, and/or investigative matters related to the government, BPK (Audit Board of Indonesia) provides follow-up recommendations to address identified issues, resolve problems, and/or improve systems to prevent similar issues from recurring. As of 2023, there are still follow-up recommendations from BPK audits that have not been acted upon by the local governments (regencies/cities) in South Sulawesi Province. Therefore, this study aims to determine the effect of the level of follow-up on BPK audit recommendations on the financial performance of local governments in South Sulawesi Province, measured by the efficiency ratio and the financial growth ratio of regional governments. The results of this study show that there is a significant effect of follow-up on BPK audit findings on the financial efficiency and financial growth of local governments.

Keywords: *BPK, Follow-up Recommendation, Local Government Performance*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Tugas akhir ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dari Program Studi Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini penulis telah mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Sawidji Widodoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., Akt., CPI, CA, CPA selaku Ketua Program Studi Profesi Akuntan FEB Universitas Tarumanagara;
4. Prof. Dr. Sukrisno Agoes, Ak., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Seluruh pimpinan, dosen, staf, dan karyawan Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis selama pelaksanaan perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir ini;
6. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir; dan
7. Rekan-rekan penulis yang telah memberikan dukungan untuk penyelesaian tugas akhir ini.

Meskipun tugas akhir ini masih belum sempurna namun penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pengguna. Penulis menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dan kekurangan penulis selama perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.

Jakarta, ... Desember 2024

Juan Ezar Tambunan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	6
2.2 Kinerja keuangan pemerintah daerah	6
2.3 Metode penilaian kinerja keuangan daerah	7
BAB III METODE PENELITIAN	9
3.1 Jenis dan sumber data	9
3.2 Metode analisis data	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1 Uji Asumsi Klasik	12
4.1.1 Uji Normalitas.....	12
4.1.2 Uji Autokorelasi Model Penelitian	13
4.1.3 Uji Multikoleniaritas.....	14
4.1.4 Heteroskedastisitas metode Glejser	15
4.2 Analsis Regresi Berganda.....	16
4.2.1 Analisis koefisien determinasi (R^2)	16
4.2.2 Uji F Simultan.....	17
4.2.3 Uji t Parsial	18
BAB V.....	19
SIMPULAN DAN SARAN	19
REFERENSI.....	20

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Uji Nomalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) Y1.....	12
Tabel 4. 2 Uji Nomalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) Y2.....	13
Tabel 4. 3 Tabel Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson (dW) Y1	14
Tabel 4. 4 Tabel Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson (dW) Y2	14
Tabel 4. 5 Uji Multikoleniaritas Model Penelitian X.....	15
Tabel 4. 6 Uji Heteroskedastisitas metode Glejser Variabel Penelitian Y1	15
Tabel 4. 7 Uji Heteroskedastisitas metode Glejser Variabel Penelitian Y2.....	16
Tabel 4. 8 Tabel Hasil Analisis koefisien determinasi (R2) Y1.....	16
Tabel 4. 9 Tabel Hasil Analisis koefisien determinasi (R2) Y2.....	16
Tabel 4. 10 Tabel hasil uji F simultan Y1	17
Tabel 4. 11 Tabel hasil uji F simultan Y2.....	17
Tabel 4. 12 Tabel hasil uji t parsial model penelitian Y1	18
Tabel 4. 13 Tabel hasil uji t parsial model penelitian Y2	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2023.....	3
Gambar 1. 2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Semester II Tahun 2023.....	4

BAB I

PENDAHULUAN

Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan daerah yang telah ditetapkan. Dengan adanya kewenangan untuk mengelola keuangan, pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hak dan kewajiban yang dimiliki secara efektif dan efisien dengan tetap mengutamakan kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah juga diharapkan dapat membantu pendistribusian sumber daya secara adil dan merata sehingga manfaat atas sumber daya yang dimiliki oleh negara dapat dirasakan oleh setiap masyarakat di seluruh Indonesia.

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Ruang lingkup keuangan daerah antara lain mencakup hak daerah untuk mengumpulkan pajak dan retribusi daerah, melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pelayanan masyarakat dan pemerintahan, membayar tagihan, menatausahakan penerimaan dan pengeluaran daerah, serta mengelola kekayaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, tertib, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa kepatutan, manfaat untuk masyarakat, keadilan, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah merupakan salah satu cara untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah (Sartika, 2019). Penilaian kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dinilai penting untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik dan dapat menjadi dasar dalam menyusun anggaran serta kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Analisis kinerja keuangan juga membantu pemerintah daerah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit keuangan di masa yang akan datang akibat pengelolaan keuangan daerah yang tidak tepat. Meskipun tujuan utama pemerintah daerah bukan untuk mencari laba atau keuntungan dari aktivitas yang

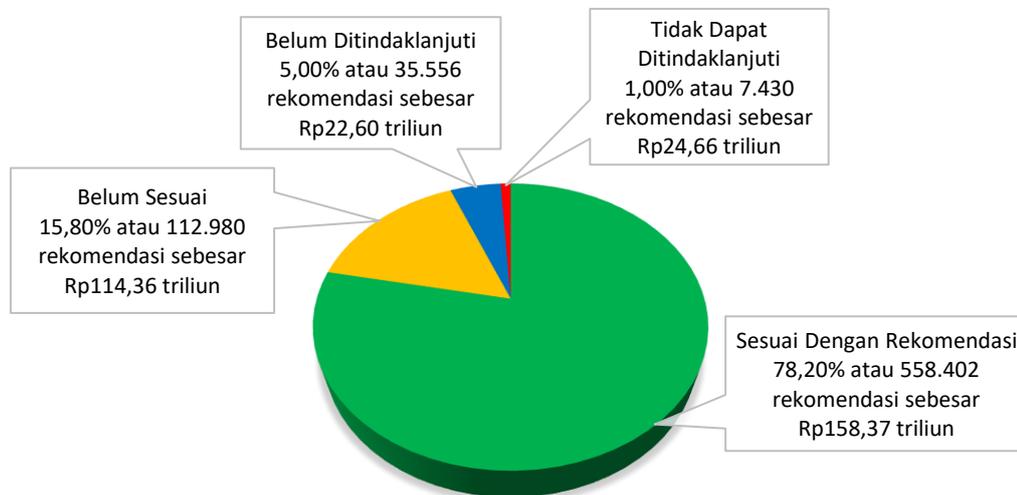
dijalankan dan dianggap memiliki kelangsungan hidup organisasi (*going concern*) yang panjang, pemerintah daerah harus tetap memperhatikan kinerja keuangan agar pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dapat dilakukan dengan seimbang sehingga tidak menimbulkan defisit di masa yang akan datang, seperti meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar agar seimbang dengan belanja daerah dan kewajiban penyelesaian pembiayaan sehingga keuangan daerah dapat mengalami surplus tanpa harus menggunakan pembiayaan baik melalui penerimaan pinjaman, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, kinerja, kepatuhan, dan/atau investigatif terhadap pemerintah pusat, lembaga negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain melaksanakan pemeriksaan tersebut, BPK juga melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, pemantauan atas pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK mengungkapkan permasalahan yang ditemukan, penyebab permasalahan, akibat, kriteria, dan rekomendasi. Rekomendasi atas temuan pemeriksaan diberikan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan, menyelesaikan permasalahan, dan/atau memperbaiki suatu sistem agar permasalahan serupa tidak terjadi lagi. Hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta kepada pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pejabat wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Pejabat terkait juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK atas tindak lanjut rekomendasi selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Dalam menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK, entitas pemeriksaan menyusun rencana kerja (*action plan*) untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh

entitas dalam melaksanakan tindak lanjut. BPK akan melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan entitas pada setiap semester dan berdasarkan pemantauan tersebut akan diketahui apakah pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan entitas telah sesuai dengan rekomendasi, belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti, atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

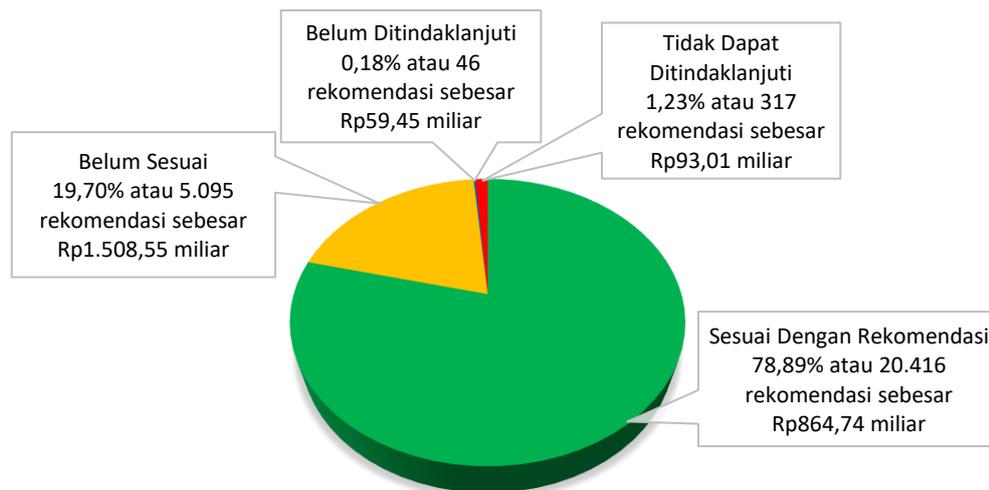
Berdasarkan data yang disajikan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2023 BPK telah menyampaikan 714.368 rekomendasi kepada entitas pemeriksaan dengan nilai sebesar Rp319,99 triliun yang ditunjukkan pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1. 1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester II Tahun 2023

Sumber: IHPS Semester II Tahun 2023

Informasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas merupakan tindak lanjut pemerintah pusat, lembaga negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara atas temuan pemeriksaan BPK melalui pemeriksaan keuangan, kinerja, dan kepatuhan. Pada entitas yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan data yang disajikan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2023 diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2023 BPK telah menyampaikan 25.874 rekomendasi kepada entitas pemeriksaan dengan nilai sebesar Rp2,52 triliun yang ditunjukkan pada **Gambar 1.2**.



Gambar 1. 2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Semester II Tahun 2023

Sumber: IHPD Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 46 rekomendasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti namun belum sesuai sebanyak 5.095 rekomendasi yang berasal dari temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidakhematan, ketidakefisienan, serta ketidakefektifan. Faktor-faktor seperti koordinasi yang belum optimal (Sugih Sutrisno, 2021), budaya kerja yang belum optimal (Nahor, J. L. B., Adriani, A., Nor, W., 2021), kurangnya pemahaman tentang cara melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dan proses tindak lanjut yang belum dilakukan berdasarkan standar yang ada (Essing, S. A., Saerang, D. P. E., Lambey, L., 2017), kelemahan pengawasan dan pengendalian internal serta kurangnya dukungan dari pihak legislatif (Budaya, A., 2016) merupakan faktor yang mempengaruhi proses tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Fenomena belum selesainya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2023 menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis

apakah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Pada penelitian ini, indikator kinerja keuangan daerah yang digunakan adalah tingkat efisiensi dan tingkat pertumbuhan keuangan daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.

REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023*. Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023*. Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta. Badan Pemeriksaan Keuangan.
- Budaya, A. & Sugiri, S. (2019). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Unit Pembina Badan Usaha Milik Daerah. *Accounting and Business Information Systems Journal (Online)*, 7, 4, <https://jurnal.ugm.ac.id/abis/article/view/58797/28672>, (Diakses pada 15 November 2024).
- Budianto, A. (2021). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Statistisik Diskominfo Kab. Magelang*, 32, 1–18.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: Indeks.
- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi dan Manajemen*, 17, 72-88.
- Essing, S. A., Saerang, D. P. E., & Lambey, L. (2017). Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1), 118–128.
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics 5th Edition (5th ed.)*. SAGE Publications Inc.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. 26. (10th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mangkunegara, A. P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nahor, J. L. B., Adriani, A. & Nor, W. (2021). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan APIP Inspektorat Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9, 1-16.
- Putra, S. S. & Sentosa, M. F. (2021). Analisis Tindak lanjut Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *ProBank: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 1, 120-128.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147-153.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia)*. Surakarta. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.